

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Indonesia tumbuh berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah masuknya UMKM. literasi keuangan sangat diperlukan terutama bagi pemilik UMKM untuk dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik dan akurat. Tingkat penyediaan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan, didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik dan pengetahuan keuangan dasar yang baik.

Hasil penelitian (Wahyu Rumbianingrum, 2018) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan UMKM binaan anggota KSU Misykat DPU DT di Bandung Raya sama halnya dengan penelitian (Sugiharti & Maula, 2019), hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dengan indikator literasi keuangan pribadi dasar, literasi tabungan dan kredit, literasi investasi, dan literasi asuransi umum. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa FEB Universitas Singaperbangsa.

Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang perlu digunakan individu nantinya sebagai acuan untuk mengelola keuangan pribadi, keluarga, dan bisnisnya (CHEN, 1998). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Literacy* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial management behavior*. Hal ini menunjukkan tingkat literasi keuangan yang semakin tinggi maka akan semakin baik dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan. (Zaniarti & Wijaya, 2020)..

Selanjutnya adalah literasi keuangan tentang simpanan dan kredit, menurut penelitian dari (Rasyid, 2012), yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang”, diperoleh hasil bahwa literasi mahasiswa tentang kredit masih berada pada katagori cukup atau sedang, hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa belum mampu memposisikan kredit dengan benar. Maksudnya adalah memposisikan kredit sebagai alat bantu yang sehat dan bukan sebagai kelebihan uang untuk memenuhi berbagai keinginan yang menyesatkan. Hal ini bisa disebabkan karena masih kurangnya pengenalan tentang keputusan pendanaan yang tepat.

Bidang literasi keuangan lainnya adalah literasi investasi. Peran literasi keuangan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal berinvestasi karena mereka memiliki pengetahuan/pemahaman tentang cara berinvestasi di sarana investasi yang tersedia. Secara khusus, mereka yang disiplin untuk meningkatkan literasi keuangan mereka memahami cara terbaik untuk mengadopsi sikap cerdas ketika membuat keputusan transaksi tentang investasinya. Dalam UMKM, literasi keuangan investasi adalah literasi keuangan yang terkait dengan keputusan investasi untuk pengembangan modal UMKM, termasuk mengelola investasi dari pihak eksternal dan mitra dan sebaliknya kepada mitra bisnisnya.

Misalnya berinvestasi di perusahaan yang memperdagangkan produknya sebagai bentuk kerjasama bisnis antar mitra. Dalam arti, perlu untuk menganalisis atau mengamati faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan ketika membuat keputusan investasi. Selain itu, literasi keuangan memberikan wawasan

untuk mencegah penipuan investasi yang berkedok keuntungan besar. Alasannya adalah para

penyandang literasi keuangan memahami bahwa tidak mungkin mendapatkan pengembalian tinggi dengan risiko rendah, hal tersebut sesuai aturan investasi emas bahwasannya *high risk high return*. Di sisi lain, (Rasyid, 2012) menemukan bahwa literasi keuangan investasi yang dicapai oleh mahasiswa dengan standar yang memadai dan kompetensi pengelolaan keputusan keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen UNP sebagian besar dalam kondisi yang tidak baik.

Literasi keuangan yang keempat adalah asuransi. Karena tingginya ketidakpastian ekonomi saat ini, sekarang perlu untuk memiliki asuransi. Seperti asuransi jiwa, asuransi properti dan kecelakaan, kebakaran rumah dan mobil bisa sangat membantu untuk menutupi kerugian pribadi. Di sisi lain, (Rasyid, 2012) menemukan bahwa kompetensi asuransi yang dicapai mahasiswa Program Studi Manajemen UNP dalam kriteria cukup sedangkan kemampuan manajemen pengambilan keputusan keuangan sebagian besar kurang.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif secara ekonomi di Asia Tenggara. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-10 di dunia dengan paritas daya beli dan anggota G-20. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus tumbuh secara signifikan setiap tahun, dari \$165,21 triliun pada tahun 2000 menjadi \$932,259 triliun pada tahun 2016. Peluang pasar untuk jasa, pertanian, perikanan, sumber daya alam dan pendidikan mencapai \$1,8 triliun. Selain itu, dapat menampung 113 juta pekerja terdidik (Oberman, 2012). Sebuah kekuatan ekonomi besar yang didorong oleh potensi ekonomi Indonesia, memiliki peluang

untuk menjadi salah satu negara besar dunia. Potensi ekonomi Indonesia pertama-tama berasal dari sumber daya alamnya.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama di sektor pertanian/kelautan, kehutanan dan pertambangan. Di sektor pertanian, Indonesia merupakan salah satu dari tiga produsen karet terbesar di dunia, produsen kopi terbesar ketiga, dan salah satu produsen kelapa, tembakau, kakao, dan rempah-rempah terbesar di dunia. Mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan, Indonesia memiliki cadangan ikan yang sangat kaya. Hutan Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia, sehingga memiliki sumber daya hutan yang melimpah.

Di sektor pertambangan, Indonesia kaya akan cadangan mineral seperti timah, tembaga, emas, bauksit dan nikel. Indonesia juga dikenal sebagai pengekspor gas alam cair (LNG) terbesar. Kedua, sumber daya manusia. Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia (Permana et al., 2017). Kementerian Dalam Negeri telah merilis data kependudukan triwulan II tahun 2021 melalui Ditjen Dukcapil pada 30 Desember 2022. Jumlah penduduk Indonesia diketahui sebanyak 273.879.750 jiwa. “Dibandingkan tahun 2020 meningkat 2.529.861,” kata Direktur Eksekutif Dukcapil Profesor Zudan Arif Fakrulloh menanggapi permintaan informasi lebih lanjut dari wartawan, Rabu (23 Februari 2022). Dari 273 juta orang tersebut, 138.303.472 adalah laki-laki (50,5%) dan 135.576.278 adalah perempuan (49,5%) (Kemendagri, 2022).

Di sisi lain, meskipun potensi ekonomi Indonesia sangat besar, namun masih menghadapi masalah sosial yang serius. Hal ini tercermin dari masih relatif tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 9,54% pada Maret 2022

atau 26,16 juta orang. Jumlah ini turun 340.000 dari September 2021 dan 1,38 juta dari Maret 2021. Namun angka tersebut masih dianggap cukup tinggi sebagai garis kemiskinan.

Sementara itu, tingkat pengangguran masih sangat tinggi, dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran mencapai 5,83% pada Februari 2022. Meski mencatatkan penurunan dibandingkan Februari 2021, situasi ketenagakerjaan belum bisa dikatakan pulih. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran akan mencapai 5,83% pada Februari 2022. Angka ini turun dari 6,26% dibandingkan Februari 2021. Jumlah pengangguran di Indonesia turun dari 8,75 juta pada Februari 2021 menjadi 8,4 juta pada Februari tahun ini. "Tingkat kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2022 belum sepenuhnya pulih dari situasi pra-Covid-19," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (5 September 2022). Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran sebelum pandemi Covid 19 atau Februari 2020 sangat rendah yaitu 4,94%. "Jika melihat angka pengangguran Februari 2020, angka pengangguran saat itu sebesar 4,94%. Tapi kita tidak kembali ke keadaan sebelum krisis," jelasnya.

Selain itu, (Margo, 2021) menjelaskan dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja turun 7,57 juta, dari 19,1 juta pada Februari 2021 menjadi 11,53 juta pada Februari tahun ini. Secara spesifik, sekitar 9,44 juta orang terkena dampak pengurangan jam kerja akibat Covid-19. Jumlah itu turun dari 15,72 juta pada Februari 2021. Sejak itu, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan karena Covid-19 telah turun dari 1,11 juta sebelumnya menjadi kurang dari 580.000. Sementara itu, jumlah non-pekerja akibat Covid-19 mencapai 550.000 dan pengangguran akibat Covid-19 mencapai 960.000. "Jumlah penduduk usia kerja yang terdampak

pandemi Covid-19 masih cukup besar, sehingga kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi Covid-19,” imbuhnya (Bisnis, 2022).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah masuknya UMKM. Menurut Pasal 33(4) UUD 1945, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dan strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga berperan sebagai lapangan kerja (Kurniasih et al., 2020). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM kini mencapai 64,19 juta, memberikan kontribusi 61,97% atau Rp8.573,89 triliun terhadap PDB. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menangkap hingga 60,4% dari total investasi.

Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan dan keadaan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengubah pola konsumsi barang dan jasa, memberikan momentum untuk mempercepat transformasi digital. Sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi suatu negara, keberadaan UMKM menjadi sangat penting karena berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto negara dan menyerap tenaga kerja. Untuk mendukung upaya pengembangan UMKM, pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengertian Usaha Yang Terdiri Dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan survei UMKM Jawa Timur

yang dilakukan oleh BPS Jawa Timur tahun 2012, jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 6.825.931 .

Kabupaten Lamongan sendiri terdapat 130.006 UMKM yang telah menyerap sebanyak 327.422 tenaga kerja. Ini adalah data tahun 2016 berdasarkan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Kembangbahu sendiri jumlah UMKM nya mencapai 4.214. Dimana jumlah tersebut terbagi di berbagai kategori UMKM, untuk jumlah UMKM dengan kategori terendah adalah UMKM Fashion dengan jumlah 22. Sedangkan untuk jumlah UMKM dengan kategori tertinggi adalah UMKM dengan kategori lainnya dengan jumlah 1.407. Sedangkan UMKM dengan kategori kuliner berjumlah 942, UMKM dengan kategori kerajinan (handicraft) berjumlah 44, UMKM dengan kategori perdagangan berjumlah 1.247, dan yang terakhir UMKM dengan kategori jasa berjumlah 552.

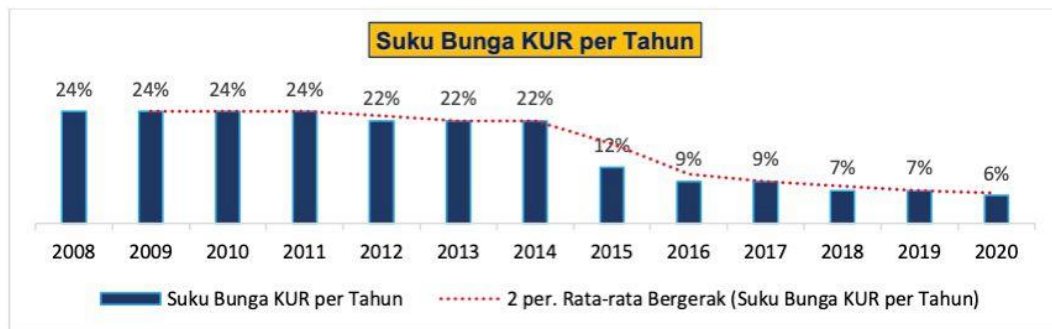
Para pengusaha UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah kurangnya permodalan, baik dari segi jumlah maupun sumber pendanaannya (Syahrir & Nasution, 2013). Indonesia memiliki lembaga jasa keuangan yang membantu para pelaku bisnis dengan keuangan perusahaan. Pada tahun 2014, OJK menerbitkan Surat Edaran No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Penyelenggaraan Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Konsumen dan Masyarakat Umum. Hal ini didasarkan pada empat prinsip: kelengkapan, sistematis dan terukur, akses mudah dan kolaborasi.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan

meningkatkan kapasitas permodalan terkait dengan pelaksanaan langkah-langkah penguatan UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR akan dihimpun dari dana bank yang disediakan untuk modal kerja dan investasi dan akan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan kelompok usaha koperasi.

Program KUR dalam perkembangannya mengalami perubahan aturan pendanaan. Penyaluran KUR periode pertama dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2014, dimana subsidi KUR diberikan melalui mekanisme Luran Jaminan Pelayanan (IJP). Biaya Jasa Penjaminan adalah biaya jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan untuk bertindak sebagai penjamin atas kredit/pinjaman UMKM-K yang disalurkan oleh bank pelaksana sehubungan dengan KUR. Kemudian, pada tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM mengevaluasi pelaksanaan KUR dengan pola penjaminan dan menetapkan bahwa program tersebut tidak sesuai sasaran.

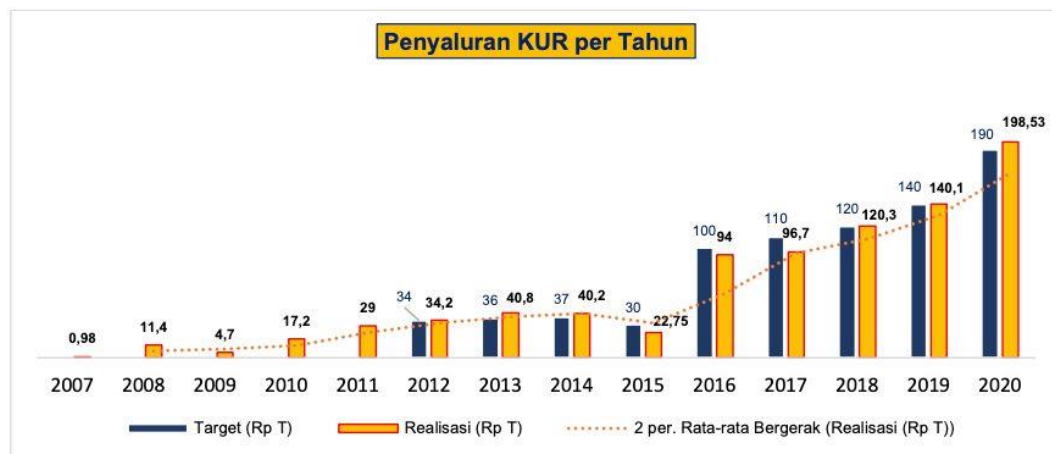
Diputuskan untuk menerapkan program KUR dengan sistem subsidi bunga dan margin mulai Agustus 2015. Subsidi bunga adalah bagian bunga yang ditanggung oleh pemerintah dan sama dengan selisih antara tingkat bunga yang diterima dari pemberi pinjaman/penyedia keuangan dan tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam. Subsidi margin, di sisi lain, adalah persentase margin yang ditanggung oleh pemerintah sama dengan selisih antara margin yang diterima dari penyedia kredit/keuangan dan margin yang dibebankan kepada peminjam dalam skema pinjaman Syariah. Pemberian subsidi suku bunga/margin berarti suku bunga pinjaman/pinjaman KUR sangat rendah dibandingkan dengan pinjaman bank umum, berikut merupakan gambar 1.1 suku bunga KUR per tahun.



Gambar 1.1 Suku KUR per Tahun

Sumber : Data Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM

Pada Gambar 1.1 dijelaskan bahwasannya tingkat suku bunga terus turun sebesar 24% sejak tahun 2008 dan kemudian terus turun ke level 6% pada tahun 2020. Mengenai sistem KUR Syariah, mengingat prinsip Syariah tidak mengenal bunga dan tidak menggunakan istilah kredit, istilah Margin dan Pendanaan telah ditambahkan ke dalam Keputusan Menteri Koordinator No. 9 Tahun 2016. Permenko No 6 Tahun 2019 ada perpanjangan KUR Syariah, yang sebelumnya hanya bisa menggunakan Perjanjian Murabahah, namun sekarang KUR Syariah bisa menggunakan perjanjian Syariah lainnya. Di bawah ini Gambar 1.1 adalah penyaluran KUR tahunan, peminjam KUR tahunan dan suku bunga KUR tahunan dari 2007 hingga 2020 (Humas BNN, 2012). Dimana dari tahun ke tahun Penyaluran KUR sendiri mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2007 realisasi penyaluran KUR sebesar 0,98 T, sampai dengan tahun 2020 penyaluran KUR ditargetkan sebesar 190 T namun realisasinya naik sebesar 198,53 T. Namun, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, dibawah ini gambar 1.2 menjelaskan penyaluran KUR per tahun.

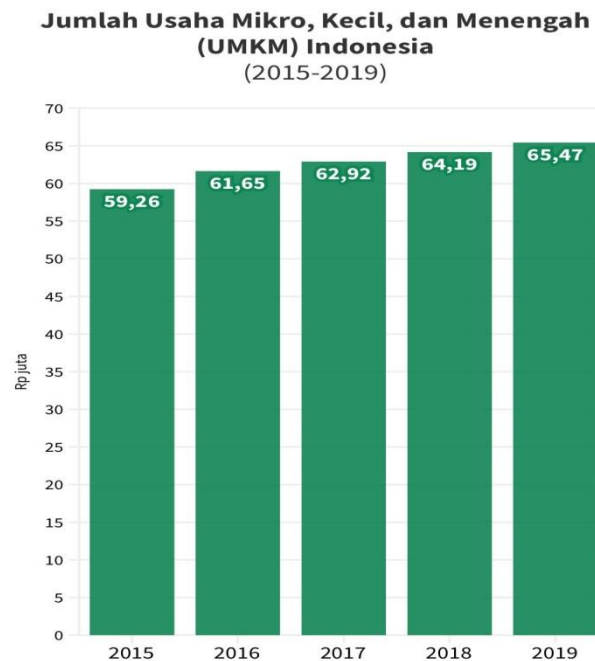


Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Gambar 1.2 Penyaluran KUR per Tahun

Sumber : Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menemukan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) SS mencapai 65,47 juta unit pada 2019. Berdasarkan Gambar 1.2 diatas jumlah itu naik 1,98% dari tahun lalu 64,19 juta unit. Jumlah ini mencapai 99,99% dari seluruh bisnis Indonesia. Di sisi lain, hanya ada 5.637 perusahaan besar atau setara dengan 0,01%. Secara spesifik, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro. Jumlah ini setara dengan 98,67% dari seluruh UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan UKM. Persentase itu adalah 1,22% dari seluruh UMKM di tanah air. Sedangkan usaha menengah hanya memiliki 65.465 unit. Jumlah ini menyumbang 0,1% dari seluruh UKM di Indonesia. Dibawah ini merupakan gambar 1.3 yang menjelaskan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (2015-2019).



Gambar 1.3 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia
2015-2019

Sumber : (Tira Santia, 2020).

Jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah seperti pada Gambar 1.3 diatas dimana jumlah UMKM tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami kenaikan, yang awalnya berjumlah 59,26 juta menjadi 65,47 juta. Namun UMKM tersebut tumbuh lambat dan dalam beberapa kasus UMKM telah berhenti beroperasi. Tanpa pengetahuan tentang kewirausahaan, tata kelola perusahaan dan manajemen keuangan, UMKM akan mengalami perkembangan yang lambat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor ini telah diakui sebagai kontributor penting untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, keberlangsungan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang serupa (Prasetya et al., 2021).

Menurut (Anggraeni, 2015), ada empat hambatan utama yang dihadapi stakeholders UMKM. keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia, inovasi

produk dan teknologi, serta pemasaran. Namun, yang sangat umum di bidang permodalan menjadi alasan khas mengapa banyak UMKM yang tidak berkembang. Pengelolaan keuangan UMKM merupakan salah satu isu utama UMKM. Pengelolaan keuangan UMKM yang buruk akan mempengaruhi kinerja dan akses mereka terhadap dana. Hal ini juga sependapat dengan (*Risnarningsih, 2017*) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan salah satu masalah yang sering diabaikan oleh para pelaku usaha mikro, terutama mengenai penerapan prinsip keuangan dan akuntansi yang benar. Pengelolaan keuangan yang baik berdampak positif bagi kelangsungan usaha. Menurut (*Ediraras, 2010*), pengelolaan dan pemberitahuan keuangan usaha UMKM yang transparan dan akurat akan berdampak positif bagi usaha UMKM itu sendiri (*Tira Santia, 2020*).

Literasi keuangan yang baik membantu individu mengelola keuangan mereka. Hal ini juga disampaikan oleh OJK (*SNKI Revisit, 2017*). Literasi keuangan telah menjadi *life skill* bagi setiap individu agar dapat merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dilakukan pada tahun 2016 dengan 9.680 responden di 34 Provinsi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 29,7% pada tahun 2016 dan tingkat inklusi keuangan sebesar 67,8%. Menurut hasil survei OJK tahun 2013 dalam (*Anggraeni, 2015*), kelompok UMKM memiliki tingkat literasi keuangan hanya 15,68%. Akibatnya, UMKM Indonesia menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan akses dana. Menurut Greenspan dalam (*Anggraeni, 2015*), literasi keuangan harus diterapkan dalam konteks tata kelola perusahaan, dimulai dengan penganggaran, merencanakan penghematan uang perusahaan,

dan mengembangkan literasi keuangan dasar untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan.

Dilihat dari kontribusi yang signifikan dari UKM di Indonesia, memberikan peluang besar bagi pengembangan pasar dan industri dalam negeri, terutama di sektor riil. Namun, para pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya karena kurangnya keterampilan manajemen keuangan. Menurut (Setyobudi, 2007), permasalahan mendasar yang sering dialami oleh pelaku UMKM adalah masalah permodalan, umumnya bentuk badan hukum formal, sumber daya manusia, pengembangan produk dan aspek pemasaran. Selanjutnya (Setyobudi, 2007) mengutip survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa para pelaku UMKM masih menghadapi masalah dan kendala yakni rendahnya kinerja UMKM dalam kemampuan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Sensus Pelayanan Koperasi dan UKM Jatim, jumlah UMKM Jatim tahun 2018 sebanyak 9,7 juta unit, memberikan kontribusi 56,93% terhadap perekonomian Jatim. KUMKM Kabupaten Lamongan 2019 membantu perekonomian mencapai \$26,46 triliun. Pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (BRDP) Jawa Timur akan mencapai 57,25%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 7,05% pada kuartal II. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2019 dunia digemparkan dengan Covid-19, pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan beberapa kehancuran pada ekonomi, yang mengakibatkan penutupan paksa banyak perusahaan dan kegiatan ekonomi (Nguyen & Hoang Dinh, 2021). Sekitar 300.000 UMKM di Kabupaten Lamongan terkena dampak

pandemi COVID-19, dengan jumlah UMKM di Kabupaten Lamongan meningkat 9,2% pada tahun 2021, dari 302.743 menjadi total 277.161 pada tahun 2020. Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menangkap hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia, UMKM dapat menjadi andalan penyerapan tenaga kerja dan menggantikan produksi barang konsumsi dan barang setengah jadi (Novilillilah, 2020).

Manajemen keuangan, yang sering dialami oleh pemilik usaha kecil, tetap menjadi penghalang. Masalah ini muncul karena keterbatasan pengetahuan keuangan. Akibatnya, kinerja bisnis saat ini tidak membaik bahkan tampak stagnan. Menurut (Wahyu Rumbianingrum, 2018), semakin tinggi *financial savvy* seseorang maka akan semakin baik dalam mengelola keuangannya. Hal ini juga disampaikan oleh OJK (SNLKI Revisit 2017), yang menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kecakapan hidup yang memungkinkan individu dapat merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, OJK terus berupaya meningkatkan literasi keuangan yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan konsumen dan masyarakat diharapkan dapat mengelola keuangan pribadi maupun usahanya secara baik (Permana et al., 2017)

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Rasyid, 2012) yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang”. Perbedaan penelitian ini yaitu yang pertama dengan menambah variable penelitian demografi. Penambahan variable ini dikarenakan Faktor demografi berdasarkan (Robb & Sharpe, 2009), merupakan suatu pengetahuan yang membahas sifat, tingkah laku dan sikap dari individu

yang ditentukan dari faktor-faktor misalnya, usia, gender, pendapatan, pendidikan dan lamanya usaha individu atau pelaku usaha. Faktor-faktor dari pengelolaan keuangan pelaku usaha sering disebut demografi pengusaha yaitu gender, pendidikan, pendapatan (Amaliyah et al., 2015). Penelitian ini menggunakan tingkat Pendidikan dan tingkat pendapatan sebagai faktor demografi pengusaha yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan dapat memahami bagaimana cara dalam mengelola kuangannya dengan baik, misal pelaku usaha yang memiliki *background* pendidikan di bidang bisnis akan lebih baik kemampuannya dalam mengelola keuangan dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak memiliki *background* pendidikan bisnis. Lamanya usaha merupakan lamanya pelaku usaha dalam menjalankan operasional usaha yang sedang dijalani saat ini. Lamanya usaha akan membuat pelaku usaha memiliki pengalaman sehingga mempengaruhi tingkat pengamatan pelaku usaha dalam bertindak laku. Tingkat pendapatan usaha merupakan uang yang diperoleh oleh pelaku usaha dalam perjalanan usahanya, hal ini merupakan salah satu daripenentu maju tidaknya suatu usaha (S. A. Sari & Howara, 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan).”

1.2 Rumusan Masalah

Para pengusaha UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah kurangnya permodalan, baik dari segi jumlah maupun sumber pendanaannya (Anggraeni, 2015). Dari permasalahan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan meningkatkan kapasitas permodalan terkait dengan pelaksanaan langkah-langkah penguatan UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian mendalam meliputi :

1. Apakah literasi keuangan tentang pengetahuan keuangan dasar berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
2. Apakah literasi keuangan dalam hal simpanan dan kredit berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
3. Apakah literasi keuangan terkait investasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
4. Apakah literasi keuangan asuransi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
5. Apakah demografi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

6. Apakah demografi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
7. Apakah literasi keuangan tentang pengetahuan dasar berpengaruh signifikan terhadap simpanan dan kredit, investasi, asuransi dan demografi pendidikan, pendapatan mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana literasi keuangan tentang pengetahuan keuangan dasar mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
2. Bagaimana literasi keuangan mempengaruhi simpanan dan kredit terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
3. Bagaimana literasi keuangan mempengaruhi investasi terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
4. Bagaimana literasi keuangan mempengaruhi tentang asuransi terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
5. Bagaimana demografi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan
6. Bagaimana demografi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

7. Bagaimana literasi keuangan tentang pengetahuan keuangan dasar, simpanan dan kredit, investasi, asuransi dan demografi pendidikan, pendapatan mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM/Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan bagi para pelaku UMKM tentang pentingnya literasi keuangan dan bagaimana mengelola keuangan perusahaan dengan baik dan akurat.

2. Akademis/Peneliti

Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan.